



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Gunung Tembak RT 6, Kel. Kampung Enam, 77123
Telepon 0551-3806403

RENJA PERUBAHAN

2023



P RAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2023.

Dokumen Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2023.

Dokumen renja ini memuat program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan yang akan dijalankan oleh seluruh unit yang ada di lingkup Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, serta target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, sebagai wujud konkrit peran serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan.

Ucapan terima kasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini. Upaya koreksi konstruktif dan masukan-masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Renja di masa datang.

Tarakan, 6 September 2023
Kepala Dinas,



H. Sutanto, S.Sos, M.AP.
196806041988031010

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengharuskan setiap daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Paralel dengan penyusunan RKPD, setiap Organisasi Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan Renja;
- b. penyajian rancangan awal Renja;
- c. pembahasan internal OPD rancangan Renja;
- d. penyusunan rancangan akhir Renja; dan
- e. penetapan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2022, memerhatikan dan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPTK Tahun 2023 adalah:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DPTK Kota Tarakan Tahun 2023.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan serta subkegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK Kota Tarakan secara sistematis.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian atau unit, dan
- d. Sebagai pedoman dalam penentuan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023 terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja DPTK Kota Tarakan

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja DPTK Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra DPTK Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan DPTK Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPTK Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran DPTK Kota Tarakan

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, serta tujuan dan sasaran Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan DPTK Kota Tarakan

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan DPTK Kota Tarakan Tahun 2023.

Bab V Penutup

BAB

2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPTK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPTK Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakandimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Kajian (review) dilakukan terhadap pelaksanaan renja tahun lalu (tahunn-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renjatahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPTK Tahun2022 dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPTK Kota Tarakan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pada tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perbandingan perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran. Kedua capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, serta Tabel 2.4.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra DPTK s/d Triwulan 2 Tahun 2023

N o	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RENJA sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Keteranga n
									I											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	5	6		7		8		9		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten		280,000,000		-	95 %	280,000,000		50,587,005		50,587,005				50,587,005			DPTK	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	126,500,000	0 Orang	-	16 Orang	126,500,000	0 Orang	20,783,505	16 Orang	20,783,505	100.00 %	16.43%	16 Orang	20,783,505	100.00 %	16.43%	DPTK	
2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 unit	153,500,000	0 unit	-	6 unit	153,500,000	0 unit	29,803,500	3 unit	29,803,500	50.00%	19.42%	3 unit	29,803,500	50.00%	19.42%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													75%	17.92%			75%	17.92%		
Predikat kinerja													S	SR			S	SR		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap		155,000,000		-	24,36 %	155,000,000		-		3,030,000				3,030,000			DPTK	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota																			
3	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	20,495,110	0 Orang	-	300 Orang	20,495,110	0 Orang	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	0 Orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	

4	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 orang	16,034,130	0 orang	-	250 orang	16,034,130	48 orang	-	48 orang	3,030,000	19.20%	18.90%	48 orang	3,030,000	19.20%	18.90%	DPTK	
5	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	18 Orang	58,277,880	0 Orang	-	18 Orang	58,277,880	0 Orang	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	0 Orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
6	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	18,392,880	0 Orang	-	20 Orang	18,392,880	0 Orang	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	0 Orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
7	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	21,800,000	0 Orang	-	150 Orang	21,800,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	0 Orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
8	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CP/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2 orang	5,000,000	0 orang	-	2 orang	5,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
9	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CP/PMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2 orang	5,000,000	0 orang	-	2 orang	5,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
10	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2 orang	5,000,000	0 orang	-	2 orang	5,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	5,000,000	0 orang	-	5 orang	5,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK	
										Rata-rata capaian kinerja (%)						2.13%	2.10%			
										Predikat kinerja						SR	SR			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan		149,992,668		-	60 %	149,992,668		-		7,567,660				7,567,660			DPTK	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

12	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	27,707,720	0 Laporan	-	2 Laporan	27,707,720	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	DPTK	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																			
13	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	79,480,948	0 Perkara	-	6 Perkara	79,480,948	1 Perkara	-	1 Perkara	7,567,660	16.67%	9.52%	1 Perkara	7,567,660	16.67%	9.52%	DPTK	
14	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	42,804,000	0 Lembaga	-	2 Lembaga	42,804,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0.00%	0.00%	0 Lembaga	-	0.00%	0.00%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													5.56%	3.17%			5.56%	3.17%		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi		306,000,000	-	13,91 %		306,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPTK		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	12,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	12,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	84,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	84,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	210,000,000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	210,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0%	0%			0%	0%		

Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis		4,000,000	-	90 %	4,000,000			-						-			DPTK	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																			
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	4,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0%	0%			0%	0%		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		24,000,000	-	46,12 %	24,000,000			-						-			DPTK	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																			
19	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	22,000,000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	22,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
20	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0.00%	0.00%	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0%	0%			0%	0%		

Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah		7,355,854,332		-	100 %	7,355,854,332		1,111,935,824		1,763,970,882					1,763,970,882			DPTK	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,000,000	0 Laporan	-	1 Laporan	1,000,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	DPTK		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			DPTK	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang bulan	6,541,902,332	0 orang bulan	-	714 orang bulan	6,541,902,332	714 orang bulan	1,034,568,528	178 orang bulan	1,658,882,577	24.93%	25.36%	178 orang bulan	1,658,882,577	24.93%	25.36%	DPTK		
23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85,000,000	0 Dokumen	-	12 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	12,371,500	6 Dokumen	20,812,500	50.00%	24.49%	6 Dokumen	20,812,500	50.00%	24.49%	DPTK		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			DPTK	
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	14,000,000	0 orang	-	1 orang	14,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK		
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	14,000,000	0 orang	-	1 orang	14,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0.00%	0.00%	0 orang	-	0.00%	0.00%	DPTK		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			DPTK	
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	19,999,606	0 Paket	-	17 Paket	19,999,606	0 Paket	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	0 Paket	-	0.00%	0.00%	DPTK		
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	51,341,528	0 Paket	-	21 Paket	51,341,528	0 Paket	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	0 Paket	-	0.00%	0.00%	DPTK		
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	99,999,254	0 Paket	-	53 Paket	99,999,254	0 Paket	8,940,250	16 Paket	8,940,250	30.19%	8.94%	16 Paket	8,940,250	30.19%	8.94%	DPTK		

29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	24,452,000	0 Paket	-	8 Paket	24,452,000	0 Paket	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	0 Paket	-	0.00%	0.00%	DPTK	
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	35,000,000	0 Laporan	-	2 Laporan	35,000,000	0 Laporan	2,540,000	1 Laporan	2,540,000	50.00%	7.26%	1 Laporan	2,540,000	50.00%	7.26%	DPTK	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		DPTK	
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	22,900,000	0 Unit	-	7 Unit	22,900,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	0 Unit	-	0.00%	0.00%	DPTK	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,000,000	0 Unit	-	2 Unit	5,000,000	0 Unit	4,290,000	2 Unit	4,290,000	100.00 %	85.80%	2 Unit	4,290,000	100.00 %	85.80%	DPTK	
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	0 Unit	-	2 Unit	60,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	0 Unit	-	0.00%	0.00%	DPTK	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	0 Laporan	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	2,000,000	100.00 %	100.00 %	1 Laporan	2,000,000	100.00 %	100.00 %	DPTK	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	200,000,000	0 Laporan	-	5 Laporan	200,000,000	1 Laporan	41,926,426	3 Laporan	60,206,435	60.00%	30.10%	3 Laporan	60,206,435	60.00%	30.10%	DPTK	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,399,744	0 Laporan	-	2 Laporan	2,399,744	0 Laporan	405,000	1 Laporan	405,000	50.00%	16.88%	1 Laporan	405,000	50.00%	16.88%	DPTK	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		DPTK	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	5,493,765	0 unit	-	16 unit	5,493,765	0 unit	2,048,000	10 unit	2,048,000	62.50%	37.28%	10 unit	2,048,000	62.50%	37.28%	DPTK	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	23,596,103	0 Unit	-	2 Unit	23,596,103	0 Unit	3,846,120	1 Unit	3,846,120	50.00%	16.30%	1 Unit	3,846,120	50.00%	16.30%	DPTK	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	110,000,000	0 unit	-	2 unit	110,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0.00%	0.00%	0 unit	-	0.00%	0.00%	DPTK	

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	37,770,000	0 Unit	-	27 Unit	37,770,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	0 Unit	-	0.00%	0.00%	DPTK	
Rata-rata capaian kinerja (%)													28.88%	17.62%			28.88%	17.62%		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)				8,274,847,000		R p -		8,274,847,000				1,825,155,547	15.94%	5.83%		1,825,155,547	15.94%	5.83%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...)													SR	SR			SR	SR		

Berdasarkan tabel 2.1 Realisasi program dan kegiatan Renja Tahun 2022 pada Renstra Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pencapaian Renja 85% dan pencapaian Renstra 100%;
- b. Program Program Penempatan Tenaga Kerja pencapaian Renja 22,56 % dan pencapaian Renstra 21,62%;
- c. Program Hubungan Industri pencapaian Renja 40% dan pencapaian Renstra 40%;
- d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pencapaian Renja 29% dan pencapaian Rentsra 29%

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Dari 4 program dan 8 kegiatan yang telah direncanakan, semua program memenuhi target kinerja hasil/keluaran

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Hal 14

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah atau sebaliknya, jika dikelola dengan baik akan menjadi peluang guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat.

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis diidentifikasi dari hasil analisis dan penelaahan terhadap berbagai sumber, antara lain: 1) Permasalahan pelayanan, 2) Sasaran, strategi, kebijakan, dan dinamika pembangunan nasional dan daerah (provinsi dan kota), 4) Rencana Tata Ruang Wilayah, dan 5) Isu Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan analisis dan penelaahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk periode tiga tahun mendatang sebagai berikut. 1. Optimalisasi pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha bagi IKM. 2. Peningkatan Daya saing IKM. 3. Peningkatan sarana dan prasarana industri. 4. Optimalisasi penempatan pencari kerja yang mendaftar. 5. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan 6. Peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan. 7. Peningkatan tata kelola administrasi, keuangan, dan aset. 8. Peningkatan Disiplin aparatur

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hal 15 Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2023 pada Rancangan Awal (Ranwal) Renja tahun 2023 berdasarkan Renstra tahun 2019-2024 dianggarkan sebesar Rp 7.860.847.000,- dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp 6.974.472.328,- yang diperuntukkan 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan
 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 179.995.225,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 112.469.130,- yang diperuntukkan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan
 4. Program Hubungan Industrial dengan alokasi anggaran Rp 107.803.660,- yang diperuntukkan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan
-

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran Rp 199.998.740,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan alokasi anggaran Rp 3.951.580,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan alokasi anggaran Rp 15.335.400,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Tarakan

					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja			Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	RENJA 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						584,992,668	400,268,015.00	400,268,015.00	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja yang kompeten	0.95	0.95	0.95	280,000,000	179,995,225.00	179,995,225.00	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	880 Pencari Kerja	880 Pencari Kerja	880 Pencari Kerja	280,000,000	179,995,225.00	179,995,225.00	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	16 Orang	16 Orang	126,500,000	79,999,810	79,999,810	
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 unit	6 unit	6 unit	153,500,000	99,995,415	99,995,415	

2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	Persentase tenaga kerja yang terserap	0.2436	0.2436	0.2436	155,000,000	112,469,130.0 0	112,469,130.00	
2	7	4	2.0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	113,200,000	71,564,270.00	71,564,270.00	
2	7	4	2.0 1	2	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	300 Orang	300 Orang	20,495,110	20,492,460	20,492,460	
2	7	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 orang	250 orang	250 orang	16,034,130	16,028,730	16,028,730	
2	7	4	2.0 1	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	18 Orang	18 Orang	18 Orang	58,277,880	18,277,280	18,277,280	
2	7	4	2.0 1	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20 Orang	20 Orang	18,392,880	16,765,800	16,765,800	
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan		1300 Pencari Kerja	1300 Pencari Kerja	21,800,000	21,794,660.00	21,794,660.00	
2	7	4	2.0 3	3	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	150 Orang	150 Orang	21,800,000	21,794,660	21,794,660	
2	7	4	2.0 4		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi		100 Persen	100 Persen	15,000,000	14,350,200.00	14,350,200.00	

2	7	4	2.0 4	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2 orang	2 orang	2 orang	5,000,000	4,895,360	4,895,360	
2	7	4	2.0 4	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2 orang	2 orang	2 orang	5,000,000	4,987,380	4,987,380	
2	7	4	2.0 4	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2 orang	2 orang	2 orang	5,000,000	4,467,460	4,467,460	
2	7	4	2.0 5		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	100 Persen	5,000,000	4,760,000.00	4,760,000.00	
2	7	4	2.0 5	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	5 orang	5,000,000	4,760,000	4,760,000	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	0.6	0.6	0.6	149,992,668	107,803,660	107,803,660	
2	7	5	2.0 1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja		17 Perusahaan	17 Perusahaan	27,707,720	16,999,840.00	16,999,840.00	

2	7	5	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	27,707,720	16,999,840	16,999,840	
2	7	5	2.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	5 kasus	5 kasus	5 kasus	122,284,948	90,803,820.00	90,803,820.00	
2	7	5	2.0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	6 Perkara	6 Perkara	79,480,948	47,999,900	47,999,900	
2	7	5	2.0 2	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	42,804,000	42,803,920	42,803,920	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						334,000,000	225,801,980	219,285,720	

3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	0.1391	0.1391	0.1391	306,000,000	199,998,740.00	199,998,740.00	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembangunan industri			5 Kegiatan	5 Kegiatan	306,000,000	199,998,740.00	199,998,740.00	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			12,000,000			
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	84,000,000	49,999,840	49,999,840	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	210,000,000	149,998,900	149,998,900	
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	0.9	0.9	0.9	4,000,000	3,951,580.00	3,951,580.00	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis			414 Izin	414 Izin	4,000,000	3,951,580.00	3,951,580.00	

3	31	3	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	3,951,580	3,951,580	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	0.4612	0.4612	0.4612	24,000,000	21,851,660	15,335,400	
3	31	4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				331 Usaha Industri	331 Usaha Industri	24,000,000	21,851,660	15,335,400	
3	31	4	2.0 1	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	22,000,000	19,999,660	13,483,400	
3	31	4	2.0 1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	1,852,000	1,852,000	

X															
X	X														
X	X	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7,355,854,332	6,967,956,068 .00	6,974,472,328.0 0	
X	X	1	0.1		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0		
X	X	1	2:0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1,000,000			
X	X	1	0.1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	6,626,902,332	6,629,228,332	6,629,228,332	
X	X	1	2:0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang bulan	714 orang bulan	714 orang bulan	6,541,902,332	6,541,902,332	6,541,902,332	
X	X	1	2:0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85,000,000	87,326,000	87,326,000	
X	X	1	0.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Layanan	1 Layanan	28,000,000	16,100,000.00	16,100,000.00	
X	X	1	2:0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	46 Paket	46 Paket		16,100,000	16,100,000	

X	X	1	2:0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang			14,000,000			
X	X	1	2:0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang			14,000,000			
X	X	1	0.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4 Layanan	4 Layanan	230,792,388	80,150,520.00	80,150,520.00	
X	X	1	2:0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	19,999,606	19,995,710	19,995,710	
X	X	1	2:0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket			51,341,528			
X	X	1	2:0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	53 Paket	53 Paket	99,999,254	30,285,270	30,285,270	
X	X	1	2:0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	24,452,000	9,998,740	9,998,740	
X	X	1	2:0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	19,870,800	19,870,800	
X	X	1	0.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4 Aset	4 Aset	87,900,000	22,586,222.00	29,102,482.00	
X	X	1	2:0 7	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit			22,900,000			

X	X	1	2:0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
X	X	1	2:0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3 Unit	60,000,000	17,586,222	24,102,482	
X	X	1	0.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Layanan	3 Layanan	204,399,744	167,300,000.00	167,300,000.00	
X	X	1	2:0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
X	X	1	2:0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	200,000,000	163,000,000	163,000,000	
X	X	1	2:0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,399,744	2,300,000	2,300,000	
X	X	1	0.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45 Aset	45 Aset	176,859,868	52,590,994.00	52,590,994.00	
X	X	1	2:0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	16 unit	5,493,765	5,000,000	5,000,000	

X	X X	1	2:0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 unit	2 unit	23,596,103	22,646,915	22,646,915	
X	X X	1	2:0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	2 Unit	110,000,000			
X	X X	1	2:0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27 Unit	27 Unit	37,770,000	24,944,079	24,944,079	
TOTAL												7,940,847,000	7,368,224,083	7,374,740,343	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, usulan program dan kegiatan masyarakat yang terhimpun dalam Musrenbang dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Tarakan
DPTK Kota Tarakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alamat	Kec	Kel	RT	Indikator Kinerja / Permasalahan	Target Kinerja/ Usulan Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Usulan Masyarakat Yang Diakomodir dalam RKPD							6	Usulan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13.91 %	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					jumlah kegiatan pembangunan industri	5 kegiatan	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jalan rambutan RT 2, Kota Tarakan	Tarakan Timur	Kampung Empat	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat (PRIORITAS 2)	50,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jalan sei mahakam gang melon rt 10, Kota Tarakan	Tarakan Timur	Kampung Empat	10	pemberdayaan IKM (PRIORITAS 1)	50,000,000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	400 kerja	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Tembung RT.07, Kota Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	7	Belum ada kegiatan dikelompok usaha rumah jahit An-nisa	20,000,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kel.Lingkas Ujung RT.10, Kota Tarakan	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	10	Pelatihan Kompetensi bagi pencari kerja karena Belum pernah mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja (Pembuatan roti dan Kue) Prioritas 2	20,000,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Lingkas Ujung Rt.14, Kota Tarakan	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	14	Pelatihan Kompetensi bagi pencari kerja (Menjahit Pakaian sesuai style ; Pembuatan roti dan Kue) Prioritas 2	20,000,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Lingkas Ujung Rt.16, Kota Tarakan	Tarakan Timur	Lingkas Ujung	16	Pelatihan tata boga karena Belum pernah mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja (Prioritas 1)	20,000,000	
				6			180,000,000	

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja ketiga yakni Persentase pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah rasio capaiannya bahkan mencapai 17 kali lipat. Salah satu faktor pendorong tingginya pencapaian tersebut adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS). Kemudahan dalam pengurusan izin berusaha melalui OSS tersebut mendorong pelaku IKM untuk mendaftar usahanya serta juga mendorong tumbuhnya usaha industri baru. Hasil evaluasi tersebut juga memperlihatkan bahwa, selama dua tahun terakhir kinerja pelayanan DPTK sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan capaian indikator kinerja secara umum melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari sisi penyerapan anggaran, sesuai hasil analisis (Tabel 2.3) menunjukkan bahwa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau realisasi sama dengan nol. Sebagai contoh, kegiatan Operasional UKM Center dan Rumah Kemasan dan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah. Faktor penyebabnya adalah karena tidak terbitnya surat penyediaan dana (SPD) sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Namun demikian, secara umum kinerja penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran selama dua tahun tersebut

BAB

3

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPTK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangkamendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 masih mengusung tema **“pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DPTK, yakni urusan perindustrian dan urusan ketenagakerjaan, maka dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat pada sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan.

Di dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenperin RI Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah penguatan kewirausahaan dan IKM, peningkatan nilai tambah IKM, pembangunan kerja sama kemitraan dengan industri besar, serta peningkatan proporsi penyaluran perbankan kepada IKM. Sasaran-sasaran strategis tersebut sejalan dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta dengan permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh DPTK Kota Tarakan. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, serta penetapan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPTK Kota Tarakan perlu dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI.

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2020- 2024 menyebutkan bahwa salah satu Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Indikator pencapaian sasaran tersebut antara lain: Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan, Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.

Hal ini sejalan pula dengan tujuan strategis serta dapat pula disinergikan dengan program dan kegiatan yang dijalankan DPTK Kota Tarakan guna mendukung upaya dalam mengatasi masalah belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar, masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan/atau pelatihan berbasis kompetensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPTK

Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dengan indikator persentase pertumbuhan unit usaha dan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) yang difasilitasi.
2. Menurunnya pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas DPTK dengan indikator Jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada Tabel 6

Tabel 6

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

|

Hal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya daya saing IKM yang difasilitasi	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha dan daya saing Industri kecil dan Menengah	Menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Memfasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Fasilitasi pemenuhan komitmen
				Pengawasan perizinan
			Menyediakan data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri
				Diseminasi dan publikasi data dan informasi industri melalui SIINas
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Menurunnya pengangguran	Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Makro
			Melaksanakan Pelatihan berbasis unit kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
				Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Pelayanan antar kerja
			Melaksanakan pelayanan antar kerja	Pelayanan antar kerja

				<p>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</p> <p>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</p> <p>Perluasan Kesempatan Kerja</p>
			Mengelola informasi tenaga kerja	Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja
			Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			Mencegah dan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	<p>Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan</p> <p>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p>
		Meningkatnya Akuntabilitas DPTK	Menyusun Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>
			Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan saran dan prasarana kantor
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Menyediakan/mengadakan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana serta Gedung kantor
			Menyediakan/mengadakan Jasa Penunjang	Penyediaan jasa-jasa
			Memelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana serta gedung kantor

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan atau subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024, terdapat tujuh program, 17 kegiatan (●), serta 44 subkegiatan (○) yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2023. Berikut adalah perincian program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
 - *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - *Pengadaan Mebel*
 - *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - *Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*
 - *Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota*

3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

- Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - *Pelayanan antar Kerja*
 - *Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja*
 - *Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan*
 - *Perluasan Kesempatan Kerja*
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - *Job Fair/Bursa Kerja.*
 - *Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - *Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)*
 - *Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran*
 - *Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*
- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Hal
 - *Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

4. Program Hubungan Industrial.

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - *Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan*
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
 - *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,*

dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- *Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah*

5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

- **Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**
 - *Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*
 - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*
 - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*
 - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*
 - *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

- **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**
 - *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri*
 - *Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Hal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*
 - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).*

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

-
- *Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*
 - *Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).*
 - *Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.*
 - *Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.*

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 5 rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Tarakan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
-	-	-	-	-	(2)	(6)	-	(7)	(8)	-	-	-	-
Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja								-					
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja								-					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.940.847.000				8.022.642.130	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.940.847.000				8.022.642.130	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	7.355.854.332				7.236.687.437	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000					
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1.000.000					
2	7	1	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan	6.626.902.332		2 layanan		6.621.878.332	
2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,00 Orang	14.000.000					
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- orang	-					
2	7	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	14.000.000					

1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	4 layanan	230.792.388		4 layanan	160.000.589
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	19.999.606		18 Paket	19.999.606
1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	51.341.528		21 Paket	50.000.983
				baki	4 buah	400.000			
				Panci	2 buah	200.000			
				Panci Besar Uk 45 Kg	2 buah	1.127.610			
1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	99.999.254		40 Paket	50.000.000
1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24.452.000		3 jenis	15.000.000
				Foto copy A4/Folio	14.790 Lembar	5.620.200			
1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	35.000.000		8 Laporan	25.000.000
				Kalimantan Utara - Uang Harian Dalam Provinsi 6 x 2	12 OH	5.160.000			
				Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	6 OH	2.400.000			
				Taxi Lapter	4 OH	357.800			
1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5 aset	87.900.000		5 aset	98.065.000
1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	22.900.000		1 set	33.065.000
1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000		1 Unit	5.000.000
1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000		5 Unit	60.000.000

1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	204.399.744		2	layanan	174.000.000
1	2,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		1	Laporan	2.000.000
1	2,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000		12	Laporan	170.000.000
1	2,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.399.744		2	Laporan	2.000.000
1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	41 aset	176.859.868		70	aset	182.743.516
1	2,09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	5.493.765		16	unit	5.000.000
1	2,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	23.596.103		2	Unit	23.600.000
1	2,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	110.000.000		8	Unit	114.300.000
1	2,09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	37.770.000		44	Unit	39.843.516
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun				100	%	35.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja		0		2	Dokumen	35.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	0		1	Dokumen	35.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0		1	Dokumen	-
3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	280.000.000		95	%	198.327.400
3	2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	400 kerja	280.000.000		880	pencari kerja	198.327.400
3	2,01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	126.500.000		16	Orang	46.487.000

				Belanja Jasa Profesi	-	0	7.360.000				
			Pelatihan Kompetensi bagi pencari kerja	Usulan Musrenbang	4	Usulan	80.000.000				
3	2,01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	24	unit	153.500.000		10	Unit	151.840.400
4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	24,36	%	155.000.000		24,36	%	144.974.950
4	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	1	kegiatan	113.200.000		1	kegiatan	84.975.150
4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300	Orang	20.495.110		300	orang	4.999.660
4	2,01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250	orang	16.034.130		250	orang	19.995.770
4	2,01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	18,00	Orang	58.277.880		18	orang	29.979.720
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	Orang	-				
4	2,01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	Orang	18.392.880		20	orang	30.000.000
4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	1.300	kerja	21.800.000		1.300	kerja	39.999.800
4	2,03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150	Orang	21.800.000		150	orang	39.999.800
4	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	%	15.000.000		100	%	15.000.000
4	2,04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2	orang	5.000.000		2	orang	5.000.000
4	2,04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2	orang	5.000.000		2	orang	5.000.000
				Bimbingan konseling bagi PMI bermasalah dengan Psikiater	2	op	5.000.000				

4	2,04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2 orang	5.000.000		2 orang	5.000.000
4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.000.000		100 %	5.000.000
4	2,05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	5.000.000		5 orang	5.000.000
5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	60 %	149.992.668		70 %	109.800.000
5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	15 perusahaan	27.707.720		20 perusahaan	17.000.000
5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	27.707.720		2 Laporan	17.000.000
5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	9 kasus	122.284.948		9 kasus	92.800.000
5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	79.480.948		6 Perkara	48.000.000
5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	-		1 Perkara	1.800.000
5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	42.804.000		2 Lembaga	43.000.000
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			334.000.000			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			334.000.000			297.852.343

2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13,91 %	306.000.000		13,91 %	271.999.543
2	2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembangunan industri	5 kegiatan	306.000.000		3 kegiatan	271.999.543
2	2,01	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumenn	12.000.000		2 dokumen	12.000.000
2	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	84.000.000		3 dokumen	69.999.543
2	2,01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	-		4 dokumen	190.000.000
2	2,01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	210.000.000			
2	2,01	6 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Dokumen	-			
3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	4.000.000		90 %	4.002.000
3	2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	414 izin	4.000.000		423 izin	4.002.000
3	2,01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	-			
3	2,01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000		2 dokumen	4.002.000

4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	46,12 %	24.000.000		46 %	21.850.800
4	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	331 industri	24.000.000		347 usaha industri	21.850.800
4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	-			
4	2,01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	22.000.000		4 dokumen	19.998.800
				Belanja sewa/aplikasi	1 paket	5.300.000			
4	2,01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2.000.000		2 dokumen	1.852.000
						8.274.847.000			8.022.642.130

BAB

4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis DPTK Tahun 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menetapkan rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan berikut pendanaannya.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana diperinci pada Tabel 6

Tabel 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan DPTK Kota Tarakan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023			Unit Kerja PD Penanggung Jawab (Bidang)
		1	2	3	4	5			Target	Satuan	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
		Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja										
		Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja										
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.940.847.000	
		2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.940.847.000	
Tujuan :	Meningkatnya Akuntabilitas PD							Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100	%	7.355.854.332	
	Sasaran :	Melaksanakan penyediaan penunjang urusan perangkat daerah						Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100	%	7.355.854.332	

		2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100 %	7.355.854.332	Sekretariat
		2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	Sekretariat
		2	7	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1.000.000	Sekretariat
		2	7	1	2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan	6.626.902.332	Sekretariat
		2	7	1	2.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 bulan	6.541.902.332	Sekretariat

			2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	85.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2	layanan	28.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,00	Orang	14.000.000	Sekretariat
									Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		Sekretariat
			2	7	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	orang	14.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	4	layanan	230.792.388	Sekretariat

			2	7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21	Paket	51.341.528	Sekretariat
			2	7	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	99.999.254	Sekretariat
			2	7	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	24.452.000	Sekretariat
			2	7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	35.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5	aset	87.900.000	Sekretariat
			2	7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	22.900.000	Sekretariat

			2	7	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	204.399.744	Sekretariat
			2	7	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.399.744	Sekretariat

			2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	41	aset	176.859.868	Sekretariat
			2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	unit	5.493.765	Sekretariat
			2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	23.596.103	Sekretariat
			2	7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	110.000.000	Sekretariat
			2	7	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31	Unit	37.770.000	Sekretariat

Tujuan :	Meningkatnya kesempatan kerja						Persentase tenaga kerja yang terserap	24,36 %	584.992.668	
	Sasaran :	Melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja					Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	280.000.000	
		2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	280.000.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	3	2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	400 kerja	280.000.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	3	2,01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	126.500.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	3	2,01	3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	24 unit	153.500.000	Bidang Tenaga Kerja

	Sasaran :	Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja						Persentase tenaga kerja yang terserap	24,36 %		155.000.000	
		2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	24,36 %		155.000.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	1 kegiatan		113.200.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang		20.495.110	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 orang		16.034.130	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	18,00 Orang		58.277.880	Bidang Tenaga Kerja

							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang		Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	18.392.880	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.300 kerja	21.800.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,03	3	Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	21.800.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	4	2,04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2 orang	5.000.000	Bidang Tenaga Kerja

			2	7	4	2,04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMT yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2 orang	5.000.000	Bidang Tenaga Kerja
			2	7	4	2,04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2 orang	5.000.000	Bidang Tenaga Kerja
			2	7	4	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.000.000	Bidang Tenaga Kerja
			2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	5.000.000	Bidang Tenaga Kerja
	Sasaran :	Meningkatkan Penanganan Kasus Hubungan Industrial							Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	60 %	149.992.668	
			2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	60 %	149.992.668	Bidang Tenaga Kerja

		2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	15 perusahaan	27.707.720	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	27.707.720	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	9 kasus	122.284.948	Bidang Tenaga Kerja
		2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	79.480.948	Bidang Tenaga Kerja

			2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1	Perkara	0	Bidang Tenaga Kerja
			2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	Lembaga	42.804.000	Bidang Tenaga Kerja
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				334.000.000	
			3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				334.000.000	
Tujuan :	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah yang difasilitasi								Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13,91	%	334.000.000	

	Sasaran :	Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri						Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	29,58 %		306.000.000	
			3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	13,91 %	306.000.000	Bidang Industri
			3	31	2	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembangunan industri	5 kegiatan	306.000.000	Bidang Industri
			3	31	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumenn	12.000.000	Bidang Industri
			3	31	2	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	84.000.000	Bidang Industri
			3	31	2	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	Bidang Industri

			3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	210.000.000	Bidang Industri
			3	31	2	2,01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Dokumen	0	Bidang Industri
	Sasaran :	Mengendalikan perizinan usaha industri							Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	4.000.000	
			3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	4.000.000	Bidang Industri
			3	31	3	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	414 izin	4.000.000	Bidang Industri

			3	31	3	2,01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2	Dokumen	0	Bidang Industri
			3	31	3	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	4.000.000	Bidang Industri

	Sasaran :	Menyediakan data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI					Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	46 %	24.000.000	
		3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	46,12 %	24.000.000	Bidang Industri
		3	31	4	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	331 industri	24.000.000	Bidang Industri
		3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	0	Bidang Industri
		3	31	4	2,01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	22.000.000	Bidang Industri

BAB

5

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2023, merupakan perencanaan untuk satu tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memedomani Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPTK Tahun 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023. Dokumen Renja ini diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Guna menjaga kesinambungan perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit, dan seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap

pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Rencana Kerja DPTK Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pencapaian tujuan dan target kinerja yang diamanatkan melalui Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, yakni menurunnya pengangguran, meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dan meningkatnya akuntabilitas DPTK.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai tindak lanjut dari perencanaan dan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DPTK untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, baik melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lain guna menunjang peningkatan kinerja pegawai.
2. Pegawai di DPTK dirasakan masih kurang. Oleh sebab itu, dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh pegawai guna peningkatan kinerja pegawai.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan keterlebatan dan peran serta masyarakat mulai dari proses penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi sehingga transparansi akan meningkat.